

Nomor : B/36/PP.01/2025

18 Maret 2025

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : **Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada
Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Masa
Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari
Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan
Hari Raya Idul Fitri 1446 H**

Yth.

Yth. Bupati/ Walikota (Daftar Terlampir)

di

Tempat

Sehubungan dengan Terbitnya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, serta dalam rangka memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik pada 272 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah beroperasi, maka diminta kepada Saudara agar tetap membuka pelayanan publik yang diselenggarakan pada Mal Pelayanan Publik pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H dengan memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. **Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Pelayanan publik yang diutamakan tetap beroperasi di Mal Pelayanan Publik adalah pelayanan dasar yang esensial dan berdampak langsung kepada Masyarakat yang terlebih dahulu dapat diidentifikasi secara mandiri oleh Kepala Daerah. Diutamakan pelayanan sektor kesehatan, administrasi kependudukan, kepolisian, dan pelayanan darurat lainnya;

2. **Pengaturan Jadwal dan Sistem Kerja**

Pengaturan jadwal dan sistem kerja dilakukan secara fleksibel (baik dengan cara bergilir/sif) guna menjamin ketersediaan layanan, tanpa mengurangi hak cuti pegawai dengan tetap melakukan monitoring secara berkala (penentuan akumulasi jam kerja pegawai dapat mengacu pada Perpres 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara);

3. **Koordinasi dan Pengawasan**

- Dalam melakukan pengaturan personel agar tetap berkoordinasi dengan instansi yang terintegrasi pada MPP;
- Dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan pelayanan publik selama masa Libur Nasional

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250305NKSA



dan Cuti Bersama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Kepala Daerah menyampaikan pelaporan hasil penyelenggaraan pelayanan publik kepada Menteri PANRB cq. Deputi Pelayanan Publik, paling lambat pada hari Senin, 14 April 2025 melalui form berikut: bit.ly/pelaporankinerjaMPP2025;

- c. Seluruh OPD dan instansi vertikal yang bergabung di MPP diharapkan berperan aktif dalam memastikan layanan berjalan dengan lancar demi kepentingan Masyarakat;

4. Penyampaian Informasi kepada Masyarakat

Informasi mengenai layanan yang tetap beroperasi, jadwal layanan, serta kontak darurat (*call center*/kanal pengaduan) harus diumumkan secara luas melalui media resmi (website atau media sosial atau lainnya) yang dimiliki MPP.

Demikian disampaikan, koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak narahubung Sdri. Anggun Indriyani (0852-7036-7435) dan Sdr. Fedryno Geza (0857-2991-5803).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

OTOK KUSWANDARU

Deputi Bidang Pelayanan Publik

NIP. 196906191995031001

Tembusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250305NKSA



Balai
Sertifikasi
Elektronik

DAFTAR PENERIMA SURAT

Yth. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Kota Banda Aceh	Aceh
2.	Kabupaten Aceh Besar	Aceh
3.	Kabupaten Aceh Tengah	Aceh
4.	Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh
5.	Kabupaten Pidie	Aceh
6.	Kota Langsa	Aceh
7.	Kota Lhokseumawe	Aceh
8.	Kota Medan	Sumatera Utara
9.	Kota Pematangsiantar	Sumatera Utara
10.	Kabupaten Asahan	Sumatera Utara
11.	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara
12.	Kabupaten Humbang Hasundutan	Sumatera Utara
13.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara
14.	Kota Padang	Sumatera Barat
15.	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat
16.	Kota Solok	Sumatera Barat
17.	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat
18.	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat
19.	Kota Pariaman	Sumatera Barat
20.	Kabupaten Solok	Sumatera Barat
21.	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat
22.	Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat
23.	Kota Sawahlunto	Sumatera Barat
24.	Kota Pekanbaru	Riau
25.	Kabupaten Kampar	Riau
26.	Kabupaten Siak	Riau
27.	Kabupaten Rokan Hulu	Riau
28.	Kota Dumai	Riau
29.	Kabupaten Bengkalis	Riau
30.	Kota Batam	Kepulauan Riau
31.	Kota Tanjungpinang	Kepulauan Riau
32.	Kota Bengkulu	Bengkulu
33.	Kabupaten Rejang Lebong	Bengkulu
34.	Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu
35.	Kabupaten Kaur	Bengkulu
36.	Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu
37.	Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250305NKSA



No.	Kabupaten/Kota	Provinsi
38.	Kabupaten Kepahiang	Bengkulu
39.	Kabupaten Lebong	Bengkulu
40.	Kabupaten Seluma	Bengkulu
41.	Kota Jambi	Jambi
42.	Kota Sungaipenuh	Jambi
43.	Kabupaten Sarolangun	Jambi
44.	Kabupaten Merangin	Jambi
45.	Kabupaten Tebo	Jambi
46.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jambi
47.	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi
48.	Kota Palembang	Sumatera Selatan
49.	Kota Lubuklinggau	Sumatera Selatan
50.	Kabupaten Banyuasin	Sumatera Selatan
51.	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan
52.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Sumatera Selatan
53.	Kabupaten Musi Rawas	Sumatera Selatan
54.	Kota Pangkalpinang	Bangka Belitung
55.	Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Belitung
56.	Kabupaten Bangka	Bangka Belitung
57.	Kabupaten Bangka Barat	Bangka Belitung
58.	Kabupaten Belitung	Bangka Belitung
59.	Kabupaten Tulang Bawang	Lampung
60.	Kota Metro	Lampung
61.	Kabupaten Lampung Tengah	Lampung
62.	Kabupaten Lampung Selatan	Lampung
63.	Kabupaten Lampung Utara	Lampung
64.	Kota Bandar Lampung	Lampung
65.	Kabupaten Pringsewu	Lampung
66.	Kabupaten Lampung Barat	Lampung
67.	Kabupaten Mesuji	Lampung
68.	Kabupaten Pesisir Barat	Lampung
69.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Lampung
70.	Kota Serang	Banten
71.	Kota Tangerang	Banten
72.	Kota Tangerang Selatan	Banten
73.	Kabupaten Tangerang	Banten
74.	Kabupaten Lebak	Banten
75.	Kabupaten Serang	Banten
76.	Kabupaten Pandeglang	Banten
77.	Kota Cilegon	Banten
78.	Prov. DKI Jakarta	DKI Jakarta
79.	Kota Bandung	Jawa Barat
80.	Kota Sukabumi	Jawa Barat
81.	Kota Cimahi	Jawa Barat
82.	Kota Bekasi	Jawa Barat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250305NKSA



No.	Kabupaten/Kota	Provinsi
83.	Kabupaten Bogor	Jawa Barat
84.	Kabupaten Bandung	Jawa Barat
85.	Kota Bogor	Jawa Barat
86.	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat
87.	Kabupaten Karawang	Jawa Barat
88.	Kabupaten Bekasi	Jawa Barat
89.	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat
90.	Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat
91.	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat
92.	Kabupaten Subang	Jawa Barat
93.	Kota Depok	Jawa Barat
94.	Kabupaten Sumedang	Jawa Barat
95.	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat
96.	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat
97.	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat
98.	Kabupaten Majalengka	Jawa Barat
99.	Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat
100.	Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah
101.	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah
102.	Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah
103.	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah
104.	Kabupaten Kendal	Jawa Tengah
105.	Kabupaten Kudus	Jawa Tengah
106.	Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah
107.	Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah
108.	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah
109.	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah
110.	Kabupaten Wonogiri	Jawa Tengah
111.	Kota Magelang	Jawa Tengah
112.	Kota Semarang	Jawa Tengah
113.	Kota Surakarta	Jawa Tengah
114.	Kota Tegal	Jawa Tengah
115.	Kota Pekalongan	Jawa Tengah
116.	Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah
117.	Kota Salatiga	Jawa Tengah
118.	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah
119.	Kabupaten Brebes	Jawa Tengah
120.	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
121.	Kabupaten Klaten	Jawa Tengah
122.	Kabupaten Batang	Jawa Tengah
123.	Kabupaten Blora	Jawa Tengah
124.	Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah
125.	Kabupaten Pati	Jawa Tengah
126.	Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah
127.	Kabupaten Rembang	Jawa Tengah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250305NKSA



No.	Kabupaten/Kota	Provinsi
128.	Kabupaten Sragen	Jawa Tengah
129.	Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah
130.	Kabupaten Demak	Jawa Tengah
131.	Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah
132.	Kabupaten Pemasang	Jawa Tengah
133.	Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah
134.	Kabupaten Tegal	Jawa Tengah
135.	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
136.	Kabupaten Kulon Progo	DI Yogyakarta
137.	Kabupaten Sleman	DI Yogyakarta
138.	Kabupaten Bantul	DI Yogyakarta
139.	Kabupaten Gunung Kidul	DI Yogyakarta
140.	Kabupaten Ngawi	Jawa Timur
141.	Kabupaten Malang	Jawa Timur
142.	Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur
143.	Kabupaten Madiun	Jawa Timur
144.	Kabupaten Tuban	Jawa Timur
145.	Kota Surabaya	Jawa Timur
146.	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur
147.	Kota Mojokerto	Jawa Timur
148.	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur
149.	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur
150.	Kota Batu	Jawa Timur
151.	Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur
152.	Kabupaten Gresik	Jawa Timur
153.	Kota Malang	Jawa Timur
154.	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur
155.	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur
156.	Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur
157.	Kota Pasuruan	Jawa Timur
158.	Kabupaten Jombang	Jawa Timur
159.	Kabupaten Magetan	Jawa Timur
160.	Kota Probolinggo	Jawa Timur
161.	Kabupaten Sumenep	Jawa Timur
162.	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur
163.	Kabupaten Jember	Jawa Timur
164.	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur
165.	Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur
166.	Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur
167.	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur
168.	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur
169.	Kabupaten Situbondo	Jawa Timur
170.	Kabupaten Sampang	Jawa Timur
171.	Kota Kediri	Jawa Timur
172.	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250305NKSA



No.	Kabupaten/Kota	Provinsi
173.	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat
174.	Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat
175.	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat
176.	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat
177.	Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat
178.	Kota Singkawang	Kalimantan Barat
179.	Kota Pontianak	Kalimantan Barat
180.	Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat
181.	Kabupaten Sekadau	Kalimantan Barat
182.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur
183.	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
184.	Kota Bontang	Kalimantan Timur
185.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
186.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah
187.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
188.	Kabupaten Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
189.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
190.	Kabupaten Gunung Mas	Kalimantan Tengah
191.	Kabupaten Katingan	Kalimantan Tengah
192.	Kabupaten Lamandau	Kalimantan Tengah
193.	Kabupaten Sukamara	Kalimantan Tengah
194.	Kota Tarakan	Kalimantan Utara
195.	Kabupaten Bulungan	Kalimantan Utara
196.	Kabupaten Tana Tidung	Kalimantan Utara
197.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan
198.	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan
199.	Kabupaten Tapin	Kalimantan Selatan
200.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan
201.	Kabupaten Tabalong	Kalimantan Selatan
202.	Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan
203.	Kabupaten Barito Kuala	Kalimantan Selatan
204.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan
205.	Kabupaten Karangasem	Bali
206.	Kabupaten Badung	Bali
207.	Kabupaten Gianyar	Bali
208.	Kabupaten Klungkung	Bali
209.	Kabupaten Tabanan	Bali
210.	Kota Denpasar	Bali
211.	Kabupaten Jembrana	Bali
212.	Kabupaten Bangli	Bali
213.	Kabupaten Buleleng	Bali
214.	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
215.	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat
216.	Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
217.	Kabupaten Dompu	Nusa Tenggara Barat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250305NKSA



No.	Kabupaten/Kota	Provinsi
218.	Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
219.	Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
220.	Kabupaten Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat
221.	Kabupaten Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat
222.	Kabupaten Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur
223.	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur
224.	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur
225.	Kabupaten Belu	Nusa Tenggara Timur
226.	Kabupaten Lembata	Nusa Tenggara Timur
227.	Kabupaten Malaka	Nusa Tenggara Timur
228.	Kabupaten Ngada	Nusa Tenggara Timur
229.	Kabupaten Sikka	Nusa Tenggara Timur
230.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur
231.	Kota Manado	Sulawesi Utara
232.	Kota Tomohon	Sulawesi Utara
233.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara
234.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara
235.	Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo
236.	Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah
237.	Kabupaten Morowali	Sulawesi Tengah
238.	Kota Palu	Sulawesi Tengah
239.	Kabupaten Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah
240.	Kabupaten Poso	Sulawesi Tengah
241.	Kabupaten Polewali Mandar	Sulawesi Barat
242.	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan
243.	Kabupaten Sinjai	Sulawesi Selatan
244.	Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan
245.	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
246.	Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan
247.	Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan
248.	Kabupaten Gowa	Sulawesi Selatan
249.	Kota Palopo	Sulawesi Selatan
250.	Kota Pare-pare	Sulawesi Selatan
251.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
252.	Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan
253.	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan
254.	Kabupaten Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
255.	Kabupaten Luwu	Sulawesi Selatan
256.	Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan
257.	Kabupaten Jeneponto	Sulawesi Selatan
258.	Kabupaten Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan
259.	Kabupaten Soppeng	Sulawesi Selatan
260.	Kabupaten Toraja Utara	Sulawesi Selatan
261.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250305NKSA



No.	Kabupaten/Kota	Provinsi
262.	Kabupaten Konawe	Sulawesi Tenggara
263.	Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara
264.	Kabupaten Bombana	Sulawesi Tenggara
265.	Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara
266.	Kabupaten Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara
267.	Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
268.	Kota Baubau	Sulawesi Tenggara
269.	Kabupaten Halmahera Utara	Maluku Utara
270.	Kota Jayapura	Papua
271.	Kabupaten Yapen	Papua
272.	Kabupaten Kaimana	Papua Barat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250305NKSA

